

Postur Kabinet

Wahyudi Kumorotomo

Salah satu hasil kerja Tim Transisi pemerintahan telah diumumkan secara langsung oleh presiden terpilih Joko Widodo, yaitu profil kabinet yang akan membantunya dalam masa bakti tahun 2014-2019. Pengumuman penting ini terjadi di tengah spekulasi tentang kekakuan hubungan antara SBY dan Jokowi mengenai mekanisme transisi. Para jurnalis mendapat kabar bahwa dalam rapat kabinet pekan lalu SBY menyentil sebagian anggota Tim Transisi yang dianggap lancang dengan melakukan komunikasi langsung dan seolah menyuruh-nyuruh agar para menteri yang masih menjabat memberikan laporan kepada tim.

Yang menarik bagi publik tentu postur kabinet, terdiri dari 34 kementerian yang akan diduduki oleh 18 tokoh profesional dan 16 tokoh partai politik. Meleset dari dugaan sebagian pakar bahwa Jokowi akan merampingkan postur kabinetnya, yang diumumkan ternyata masih sebanyak 34 kementerian, jumlah maksimal yang diperbolehkan berdasarkan UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara. Pengumuman Jokowi menyiratkan bahwa dalam hal jumlah kementerian, terdapat kesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya. Bedanya, jika dalam pemerintahan SBY kabinet diisi oleh 62 persen orang Parpol, dalam postur kabinet Jokowi akan terdapat 47 persen saja.

Dari sisi politik, kemunculan slot kabinet yang cukup lapang ini tampaknya merupakan upaya Jokowi-Kalla untuk menyediakan ruang negosiasi yang leluasa bagi para anggota koalisi Merah Putih yang hendak menyeberang untuk mendukung pemerintah. Namun dari sisi administrasi-pemerintahan, postur kabinet ini tampaknya masih melestarikan kecenderungan sistem "*semi-parliamentary*" di Indonesia yang sudah berjalan sejak dilaksanakannya Pilpres secara langsung. Secara formal pemerintahan masih mengikuti ketentuan konstitusi yang menganut sistem presidensiil. Tetapi, Pemilu legislatif yang menerapkan sistem proporsional terbuka dan menghasilkan pemenang yang tidak berhasil menguasai mayoritas perlemen mengharuskan pemerintahan koalisi yang memaksa Presiden untuk mengakomodasi kepentingan tokoh-tokoh Parpol.

Apaboleh buat, dengan suara koalisi pendukung Jokowi-Kalla yang hanya menempatkan 207 kursi dari keseluruhan 560 kursi di DPR, pemerintah yang akan datang tentu tidak ingin menjadi bulan-bulanan dari lawan politik yang siap mencegat apa saja inisiatif kebijakan yang diambil pemerintah. Itulah sebabnya, tawaran posisi menteri bagi para politisi lawan yang ingin mendukung pemerintah merupakan isyarat negosiasi dan sekaligus upaya untuk melapangkan jalan bagi pemerintahan yang akan datang.

Mencermati perubahan nomenklatur dan tatanan kabinet yang akan dibentuk, memang ada beberapa hal baru yang menunjukkan penyesuaian rancangan Tim Transisi ini dengan visi pemerintahan di bawah Jokowi-Kalla. Kementerian Maritim dibentuk tampaknya dengan semangat untuk membenahi sektor kelautan dan perikanan yang selama ini kurang terasa gregetnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi terkait dengan masih buruknya manajemen pendidikan tinggi dan lemahnya kaitan antara riset di perguruan tinggi dengan penerapannya dalam peningkatan daya-saing nasional. Kementerian Kedaulatan Pangan agaknya dimaksudkan untuk membenahi visi Kementerian Pertanian yang belum cukup responsif terhadap tantangan ketahanan pangan di masa mendatang. Sementara itu Kementerian Haji, Zakat dan Wakaf selain dimaksudkan untuk membenahi penyelenggaraan haji yang penuh indikasi korupsi juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendanaan melalui lembaga-lembaga syariah Islam.

Patut pula diapresiasi pernyataan Jokowi bahwa sebagian dari kementerian strategis akan dipilih dari kalangan profesional (non-Parpol), yaitu Kementerian Keuangan, ESDM, BUMN, dan Kedaulatan Pangan. Sementara itu, upaya perampingan profil kabinet akan dilakukan dengan membatasi jabatan Wakil Menteri hanya untuk Kementerian Luar Negeri. Bandingkan dengan pemerintahan SBY yang saat ini memiliki 17 orang Wakil Menteri.

Namun sampai saat diumumkannya tokoh-tokoh yang akan mengisi jajaran kabinet, rakyat masih menunggu komitmen Jokowi yang ingin memastikan agar tokoh Parpol yang masuk kabinet melepaskan jabatannya sebagai pengurus Parpol. Selain soal siapa saja tokoh yang akan menduduki jabatan penting di kabinet ini, sampai saat ini belum jelas bagaimana upaya Jokowi untuk memastikan pemerintahan yang gesit bergerak sesuai dengan dinamika permasalahan bangsa yang sangat kompleks. Di luar postur kabinet yang akan diisi oleh pejabat negara dengan pendanaan menyeluruh dari APBN, masih begitu banyak lembaga yang secara langsung atau tidak langsung dibiayai oleh negara.

Pembentukan berbagai macam lembaga *ad hoc* adalah persoalan sangat serius pada masa pemerintahan oleh SBY. Di luar struktur pokok kabinet, saat ini masih terdapat 28 LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) dan 87 lembaga non-struktural yang fungsinya seringkali tumpang-tindih dengan kabinet. Diperlukan keberanian dan konsistensi kebijakan yang kuat dari Jokowi-Kalla untuk melakukan perampingan dan re-organisasi dari lembaga-lembaga tersebut segera setelah pemerintahan baru terbentuk dan melaksanakan tugasnya. Perampingan itu diperlukan selain untuk menghemat anggaran juga untuk memastikan bahwa Reformasi Birokrasi sebagai salah satu program andalan Jokowi-Kalla dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, perlu diingat juga bahwa efektivitas kabinet sebenarnya sangat tergantung kepada kinerja para pejabat yang langsung melaksanakan kegiatan dan menangani permasalahan teknis di tingkat operasional. Biaya operasional bagi jalannya administrasi-pemerintahan saat ini begitu tinggi karena jajaran birokrasi di tingkat Eselon I dan Eselon II yang juga membengkak. Standar maksimal pejabat Eselon I di masing-masing kementerian yang semestinya hanya sekitar 5 (lima) satuan, di dalam praktik saat ini bisa lebih dari 10 satuan. Sayangnya, bahkan ada peraturan seperti Perpres No.24 tahun 2010 yang membuat nomenklatur tetap bagi seluruh jabatan Eselon I, sehingga seolah-olah jumlahnya tidak bisa lagi dikurangi walaupun efisiensi dan efektivitas sudah dikorbankan.

Harapan rakyat terhadap pemerintahan baru di bawah Jokowi-Kalla saat ini begitu tinggi. Oleh sebab itu, kebijakan yang menyangkut postur dan profil kabinet diharapkan bukan hanya sekadar sarana negosiasi politik dan bagi-bagi kekuasaan, tetapi benar-benar dimaksudkan untuk menjawab tantangan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Penulis adalah dosen Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Fisipol UGM